

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Boedi Harsono. 2012. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan: Jakarta.
- Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Menjinjau Hukum Adat Minangkabau*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Hengki Andora. 2013. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi Oleh Kerapatan Adat Nagari Air Tabit Kota Payakumbuh*. Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Kansil. 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kurnia Warman. 2006. *Ganngam Bauntuak Menjadi Hak Milik*. Andalas University Press: Padang
- LBH Padang. 2005. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA (Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan)*. Yayasan TIFA: Padang.
- Mexasai Indra, 2015 *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Moh Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Musyair Zainudin. 2011. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Ombak: Yogyakarta.
- Nawawi Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sjahmunir. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Andalas University Press: Padang.
- Supriadi. 2009. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2012. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2008.*Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia: Jakarta.

Urip Santoso. 2011.*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana: Jakarta.

Yusnani Hasyimzoem, Dkk. 2017.*Hukum Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Zenwen Pador. 2008.*Kembali Ke Nagari : Batuka Baruak Jo Cigak?* Sinar Grafika: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.46/menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi

Peraturan menteri kehutanan Nomor: P.50/Menhut-II/ 2009 Tentang Pengakuan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 60 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat

**C. Website**

<http://bumn.go.id/perhutani>, Perhutani NEWS, *Pinus yang Mengiurkan*, Diakses pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 10.57 WIB

<http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3507> diakses tanggal 19 Januari 2018 pukul 10.38 WIB

<http://www.infoagribisnis.com/pohon-pinus/&hl=id-ID>, Diakses pada tanggal 12 April 2018 pukul 20.07 WIB

